

## Kapasitas Respons Tanggap Bencana Berbasis Gender, Budaya, Dan Kelas Sosial

### Disaster Response Capacity Based on Gender, Culture And Social Class

Izza Fajria<sup>1</sup>, Baiq Lily Handayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
Email: [izzafajria118@gmail.com](mailto:izzafajria118@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
Email: [baiq.fisip@unej.ac.id](mailto:baiq.fisip@unej.ac.id)

#### ABSTRACT

*Indonesia is considered a disaster laboratory because of its geographical location. The proximity of disaster events to everyday life means that people need to have the capacity to respond to disasters wisely. Analysis of the ability to respond to disasters is seen according to gender stratification, culture and social class which greatly influence actions and efforts in dealing with disasters. Differences in response to gender often place women as a more vulnerable group. The existence of cultural diversity causes procedures and beliefs related to disasters to be different. Social class also creates inequality for people's ability to deal with disasters, especially for the lower class group. Differences in the ability to respond to disasters can be used as a reference for increasing community capacity in dealing with disasters. This article was written using the literature study method from previous research references, journals, books, and some other relevant literature, such as legal documents.*

Keyword: *disaster response, gender, culture, social class.*

#### ABSTRAK

*Indonesia dianggap sebagai laboratorium bencana sebab letak geografisnya. Dekatnya kejadian bencana dengan kehidupan sehari-hari menyebabkan masyarakat perlu memiliki kapasitas respons tanggap bencana secara bijak. Analisis kemampuan merespons bencana dilihat menurut stratifikasi gender, budaya, dan kelas sosial yang sangat berpengaruh pada tindakan dan upaya dalam menghadapi bencana. Perbedaan respons pada gender seringkali menempatkan perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan. Adanya keragaman budaya menyebabkan tata cara dan kepercayaan terkait bencana menjadi berbeda-beda. Kelas sosial juga memberikan ketimpangan bagi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok kelas bawah. Perbedaan kemampuan dalam merespons bencana dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Artikel ini ditulis menggunakan metode studi literatur dari referensi riset terdahulu, jurnal, buku, dan beberapa literatur lain yang relevan, seperti dokumen legal.*

**Kata Kunci:** Respon Bencana, Gender, Budaya, Kelas Sosial

## **PENDAHULUAN**

Terjadinya suatu bencana seringkali dilihat sebagai hubungan antara manusia dengan alam. Masih terbatasnya kajian akademik mengenai bencana disebabkan karena bencana dianggap sebagai kejadian sesaat bukan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau pengalaman kolektif. Seharusnya bencana telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan respons yang bijak untuk menghadapinya. Respons sistematis akan bencana diperlukan sebelum terjadinya bencana, keadaan darurat saat bencana hingga pemulihan pasca-bencana. Bencana selalu hadir dengan kerentanan yang berbeda. Tinggi rendahnya kerentanan berkaitan dengan respons yang diberikan ketika terjadi suatu bencana. Pendekatan yang melihat berbagai bentuk respons menitikberatkan pada pandangan individual dan institusional. Respons ini terlihat dari pola analisis tingkah laku individu dan kelompok pada setiap tahapannya. Kemampuan merespons bencana seringkali dianggap berbeda dilihat berdasarkan gender, budaya, dan kelas sosial. Secara umum studi yang berkembang memperlihatkan bahwa tingkat dari integrasi masyarakat menjadi dasar bagi kemampuan dalam menghadapi dan pemulihan pasca-bencana.

Ketepatan dan kecepatan dalam merespons bencana menjadi hal yang penting. Kemampuan dalam merespons bencana akan menentukan seberapa besar dampak yang timbul dari suatu kejadian bencana. Semakin baik kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat akan dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif dari bencana. Kemampuan yang baik juga dapat mempercepat proses pemulihan pasca-bencana. Namun jika individu atau kelompok tersebut tidak memiliki kapasitas yang mencukupi maka dampak dari terjadinya bencana bisa semakin besar dan pemulihannya akan berjalan lambat. Sehingga kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan topik yang krusial agar ketika suatu bencana terjadi dampak yang timbul dapat diminimalkan dan dihadapi dengan bijak.

Kemampuan merespons bencana berbeda pada setiap individu dan kelompok. Sebab adanya perbedaan faktor pendukung internal maupun eksternal. Misalnya pada konteks gender di mana ada perbedaan antara kemampuan perempuan dan laki-laki ketika menghadapi suatu peristiwa bencana. Seringkali perempuan dianggap lebih lemah dan berisiko ketika suatu bencana terjadi. Di sini dapat kita telaah lebih jauh bagaimana suatu gender memengaruhi kemampuan dalam merespons bencana. Jika melihat melalui kacamata budaya tentunya akan didapati sudut pandang yang berbeda mengenai cara-cara dan kepercayaan dalam terjadinya suatu bencana. Adanya perbedaan kultur, keyakinan, dan cara pandang menjadikan suatu bencana banyak dilihat sebagai simbol. Begitupun dengan kelas sosial di mana terdapat ketimpangan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Pada kelas atas dianggap akan lebih mampu untuk menghadapi pasca-bencana dan masyarakat kelas bawah akan lebih rentan. Perbedaan kemampuan dalam merespons bencana yang akan dilihat melalui perspektif gender, budaya, dan kelas sosial akan menunjukkan jika respons dari masyarakat akan terjadinya bencana sangat beragam. Sehingga memberikan pemahaman terkait perbedaan pendekatan respons bencana menurut tiga sudut pandang di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Studi kepustakaan menjadi teknik yang digunakan dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada relevansinya dengan masalah yang dipecahkan terkait dengan kapasitas respons tanggap bencana berbasis gender, budaya, dan kelas sosial (M. Nazir (1998:112). Studi kepustakaan ini dimulai dengan menetapkan topik penelitian

kemudian penulis melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam mencari suatu teori penulis mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang memiliki relevansi dengan topik yang diambil. Studi literatur bertujuan untuk mencari dasar pijakan untuk membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan penelitian. Sehingga penulis dapat memiliki pemahaman yang lebih terhadap masalah yang hendak diteliti. Sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai studi pustaka didapatkan melalui jurnal, makalah, buku, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulis untuk menemukan suatu landasan berpikir seperti pada koran serta media lain, termasuk dokumen legal.

Studi literatur ini dipilih untuk dapat menjelaskan dengan rinci dan terstruktur sehingga dapat memberikan pemahaman yang ringkas serta mudah untuk dianalisis terkait kemampuan merespons bencana berdasarkan gender, budaya, dan kelas sosial. Penulis melakukan studi mendalam melalui beberapa literatur seperti buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Kemudian hasil dari studi literatur tersebut akan disajikan dengan metode review yang dideskripsikan secara runtut agar topik ini dapat dikupas dengan data dan penelitian yang telah ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kapasitas Respons Tanggap Bencana Berbasis Gender, Budaya, Dan Kelas Sosial**

Di Indonesia sering terjadi berbagai peristiwa bencana. Secara terminologi dapat ditelusuri dari regulasi, UU Nomor 24 Tahun 2007, 2007 menyebutkan bahwa bencana merupakan *peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis*. Suatu fenomena yang terjadi tidak selalu dapat diartikan sebagai suatu bencana sebab fenomena tersebut dapat dianggap sebagai suatu bencana dilihat dari kerentanannya. Masih menurut regulasi tersebut yang membagi bencana sebagai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Beberapa bencana yang dimaksud seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gunung meletus, kecelakaan transportasi, kejadian luar biasa, konflik sosial, aksi teror dan lain sebagainya.

Jika melihat data kejadian bencana per Provinsi pada tahun 2021 menunjukkan ada 2.664 kejadian bencana dengan rincian 27 bencana gempa bumi, 263 karhutla, 13 kekeringan, 1.110 banjir, 545 tanah longsor, 677 cuaca ekstrem dan 27 gel. pasang/abrasi. Bencana ini menimbulkan korban meninggal sebanyak 588, 13.093 luka luka, 76 hilang, dan 7.690.984 menderita dan mengungsi. Dengan kerusakan rumah sebanyak 17.338 rusak berat, 24.343 rusak sedang, 94.422 rusak ringan, dan 1.285,785 terendam (Geoportal Data Bencana Indonesia, 2021). Hal ini juga ditambah dengan banyaknya fasilitas yang rusak ringan maupun berat. Intensitas terjadinya bencana di Indonesia terbilang sering terjadi. Dampak yang timbul dari suatu kejadian juga berbeda pada setiap kasusnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah konstruksi yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengenai kemampuan merespons bencana seringkali masih tersekat berdasarkan gender, budaya, dan kelas sosial. Masih minimnya kajian secara akademik mengenai bencana membuat adanya perbedaan yang semakin besar. Menjadi sangat menarik untuk melihat masing-masing komponen dalam merespons suatu keadaan bencana. Terjadinya bencana secara berturut-turut menyadarkan bahwa bencana dapat dijadikan pengalaman kolektif dan merupakan bagian dari kehidupan keseharian. Ketepatan dalam merespons suatu bencana merupakan langkah penting untuk dapat mengurangi dan meminimalkan

risiko suatu bencana. Upaya dalam merespons bencana harus dilakukan secara sistematis dalam tahap sebelum terjadinya bencana, tahap darurat ketika terjadi bencana, dan tahap pemulihan pasca-bencana. Kemampuan pada setiap tahapan ini akan dikupas satu persatu melalui perspektif gender, budaya dan kelas sosial.

### **Kapasitas Respons Tanggap Bencana Berbasis Gender**

Jika merujuk pada data administrasi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, Di mana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan (Zudan, 2021). Jumlah penduduk yang banyak tentunya menjadi tantangan tersendiri ketika suatu bencana terjadi. Proporsi jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Apalagi jika melihat melalui perspektif perbedaan yang dikelompokkan berdasarkan gender, seringkali perempuan dianggap memiliki kerentanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Menjadi penting untuk memandang bahwa gender *mainstreaming* dalam pengurangan risiko bencana memiliki arti untuk mendorong perempuan agar dapat memiliki posisi kunci dalam proses manajemen, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan program penanganan bencana. Hal ini bertujuan dalam upaya membangun kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan gender dalam pembangunan masyarakat.

Disebutkan pada Deklarasi Beijing dan Rencana aksinya mengakui bahwa bencana memengaruhi seluruh kehidupan manusia dan seringkali membawa dampak yang lebih besar pada perempuan. Pada artikel berjudul "*Gender Equality, Work, and Disaster Reduction: Making The Connection*" menyebutkan bahwa risiko bencana terdistribusikan secara berbeda di dalam masyarakat dan menggarisbawahi bahwa perempuan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang berada pada daftar kelompok dengan risiko tinggi terhadap bencana (Enarson, 2000b). Sehingga dibutuhkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan dan implementasi pencegahan bencana, mitigasi, dan *strategi recovery*. Perbedaan kerentanan yang disebabkan karena kelompok gender disebabkan oleh banyak faktor. Dampak yang ditimbulkan bagi laki-laki dan perempuan berbeda disebabkan karena relasi gender yang ada. Laporan yang diterbitkan oleh UN/IASC menyebutkan bahwa struktur relasi gender merupakan sebuah konteks yang memengaruhi kapasitas komunitas dalam proses antisipasi, menyiapkan diri, mempertahankan diri dan juga proses pemulihan pasca-bencana (Indonesia, n.d.)

Beberapa data yang menyajikan kerentanan sosial perempuan ketika terjadi bencana menunjukkan perempuan lebih banyak menjadi korban. Misalnya pada studi kasus berdasarkan data bencana di luar negeri yaitu peristiwa tsunami 2004 di India menyebabkan 391 korban meninggal perempuan sedangkan 146 laki-laki, pada peristiwa tsunami 2004 yang terjadi di Srilanka menunjukkan hal serupa yaitu setengah lebih dari total 13000 korban meninggal adalah perempuan, hal yang sama terjadi di badai mematikan Bangladesh pada tahun 1991 dari 180.000 korban perempuan merupakan korban dengan jumlah terbesar. Jika melihat data bencana yang terjadi di Indonesia juga dapat ditemukan hal serupa misalnya pada gempa dan tsunami di Aceh korban meninggal perempuan 30-40 persen lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki (Latifa, 2015) dan pada kejadian gempa di Yogyakarta pada 27 Mei 2006 mayoritas korban juga berasal dari perempuan. Pada laporan UN/IASC pada tahun 2001 berjudul "*Women, Disaster Reduction and Sustainable Development*" menyebutkan bahwa perempuan menerima dampak bencana lebih berat (Indonesia, n.d.).

Banyak kejadian bencana adanya norma kultural yang membatasi akses perempuan terhadap peringatan dan juga akses ke tempat perlindungan menjadi salah satu penyebab tingginya angka korban perempuan. Dalam tulisan berjudul *Gender dan Natural Disaster*

menyatakan “Gender membentuk dunia sosial di dalamnya, di mana berbagai peristiwa alam terjadi. Perempuan dibuat menjadi lebih rentan terhadap proses sosial yang mereka bangun” (Enarson, 2000a). Peran gender diterima sebagai konstruksi sosial membuat mobilitas perempuan saat terjadi bencana menjadi berbeda dengan laki-laki. Mobilitas ini dipengaruhi antara lain oleh konstruksi bangunan rumah yang berhubungan dengan tingginya risiko ketika terjadi bencana. Siklus kegiatan harian juga dapat menggambarkan peta kerentanan perempuan pada level keluarga. Adanya beban domestik yang ditanggung seperti memasak, menjaga anak, dan mengurus rumah kerap kali meningkatkan risiko perempuan karena mereka telat menyadari apa yang sedang terjadi. Ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki sudah terlihat ketika pra-bencana. Di mana ketika ada penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai mitigasi bencana para laki-laki yang banyak hadir. Sedangkan perempuan tidak dianggap sebagai unsur penting yang harus dilibatkan pada pelatihan. Perempuan seringkali hanya bertanggung jawab pada lingkup domestik. Padahal perempuan perlu diberi ruang agar terlibat dalam mengakomodasi dan kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Selain adanya beban domestik, adanya pembagian kerja juga menjadi aspek penting dalam melihat relasi gender ini. Di mana ada pembagian yang menyebabkan mobilitas, akses evakuasi, beban kerja, informasi hingga keterlibatan terhadap mitigasi bencana berbeda dengan laki-laki. Jika sebelum terjadinya bencana perempuan sudah mengalami diskriminasi hal serupa juga terjadi ketika suatu bencana sudah terjadi. Kebutuhan perempuan yang cenderung lebih banyak seringkali tidak terpenuhi, karena suara-suara mereka jarang dilibatkan pada tahap *emergency*. Kemampuan fisik perempuan yang dianggap lebih lemah, kapasitas tenaga yang dipandang lebih sedikit juga terkadang menjadi alasan yang sebenarnya tidak berdasar. Sebab jika dilihat dalam kegiatan sehari-hari perempuan juga membutuhkan tenaga yang besar dan cenderung lebih cekatan.

Masa darurat ketika terjadi bencana juga rentan terhadap kesehatan anak perempuan, menurut data yang dikutip melalui “*Gender and Disaster Risk Management*” menunjukkan bahwa malnutrisi lebih marak menimpa anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki di semua daerah yang terkena bencana (Indonesia, n.d.). Hal sama ketika terjadi bencana Merapi seperti iritasi mata, batuk, sesak nafas, diare, dan demam banyak menimpa perempuan. Perempuan juga mengalami siklus haid setiap bulannya, hal ini seringkali dianggap remeh dan tidak jarang sulit untuk menemukan pembalut dalam keadaan bencana yang tentunya menempatkan perempuan menjadi lebih rawan terkena dampak kesehatan reproduksi.

Dimensi yang kompleks memang bisa dianalisis terkait kerentanan perempuan ketika terjadi bencana. Seperti ketika bencana turut membawa dampak pada perekonomian, tetapi perempuan seringkali dihadapkan pada keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi. Padahal ketika suatu bencana terjadi perempuan banyak yang beralih status menjadi kepala keluarga. Di mana terdapat beban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi keluarganya.

Jika selama ini perbedaan gender membuat perempuan dipaksa untuk berada pada kelompok yang lebih rentan. Maka sudah seharusnya adanya perbaikan dalam proses mitigasi bencana dan menempatkan perempuan sebagai salah satu aktor penting yang berperan dalam menghadapi situasi bencana. Tentunya harus di mulai dari proses sebelum terjadinya bencana dengan menyiapkan perempuan dengan bekal pengetahuan yang mencukupi sehingga mampu meningkatkan ketahanan perempuan ketika terjadi bencana. Sebab jika dilihat lebih mendalam peran perempuan dalam suatu masyarakat masih menjadi kunci. Apalagi ketika suatu bencana terjadi maka sudah seharusnya upaya untuk melibatkan, mendengarkan dan memenuhi kebutuhannya menjadi prioritas dalam upaya meminimalisir kerentanan perempuan saat bencana.

## **Kapasitas Respons Tanggap Bencana Berbasis Budaya**

Kemampuan merespons bencana tidak hanya melekat pada stratifikasi gender saja tetapi juga ada pengelompokan menurut budaya yang ada pada masyarakat. Letak geografis wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng pasifik. Sebab letak inilah potensi terjadinya bencana menjadi sangat tinggi. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai laboratorium bencana karena semua jenis bencana mungkin terjadi. Bukan hanya dipengaruhi oleh letak geografis profil lingkungan yang didominasi oleh hutan tropis yang luas. Kekayaan flora dan fauna hutan tropis membuat banyak masyarakat bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil analisis pada tahun 2013 menunjukkan jika luas daratan Indonesia adalah 190,31 juta ha, sementara luas tutupan hutannya sekitar 43,28% dari luas daratan Indonesia. Hal ini membuat fungsi hutan menjadi sangat besar. Sebab banyak bencana yang bisa terjadi apabila tutupan ini rusak.

Luasnya wilayah menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman budaya yang heterogen. Kondisi ini tentunya memengaruhi peran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis pada kearifan lokal. Kearifan lokal suatu masyarakat tercipta oleh kemampuan masyarakat tersebut dalam membaca suatu fenomena alam. Biasanya dipraktikkan secara turun-temurun dalam bentuk legenda. Pengalaman empirik melalui interaksi manusia dan lingkungannya menghasilkan pengetahuan lokal sehingga dapat dimanfaatkan untuk mitigasi bencana. Konsepsi kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Agusintadewi, 2020). Geertz mendefinisikan sebagai suatu identitas kelompok kearifan lokal dipraktikkan oleh suatu masyarakat sebagai jati diri, seperti dapat ditemui pada hukum adat, nilai-nilai, budaya, kepercayaan dan tata cara. Selain itu sebagai suatu identitas yang menggambarkan kelompok (Agusintadewi, 2020) menyatakan bahwa kearifan lokal dipraktikkan oleh suatu masyarakat sebagai jati diri, seperti yang di temui pada hukum adat, nilai budaya, kepercayaan, tata kelola, dan prosedur.

Kearifan lokal dapat menjadi sarana untuk melakukan mitigasi bencana tetapi gagasan ini masih sering terabaikan. Kearifan lokal memiliki fungsi sebagai pengatur aspek kehidupan masyarakat. Misalnya pada masyarakat Dani di Papua yang memiliki kepercayaan *te aro neweak lako* artinya alam adalah aku sehingga memiliki tradisi agar memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Hal serupa dapat dilihat pada masyarakat Serawai Bengkulu mempercayai adanya hal tabu yang tidak boleh dilakukan ketika berladang agar kelestarian lingkungan dapat terwujud. Kemudian pada masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur yang memiliki anggapan bahwa masyarakat adat memiliki hak kepemilikan tanah dan penguasaan hutan menggunakan aturan adat.

Bahkan saat ini para ahli geomitologi dan paleotsunami melacak gempa dan tsunami purba melalui legenda *Nyl Roro Kidul*, dan menemukan hipotesis jika legenda itu merupakan peristiwa yang benar terjadi. Peristiwa alam dengan gelombang raksasa. Berangkat dari legenda yang ada para peneliti justru menemukan bukti empirik dan dapat mempelajari siklus untuk peristiwa alam. Tentu saja penemuan ini dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana. Masyarakat adat juga biasanya memiliki kecakapan untuk membaca tanda-tanda alam. Seperti pada masyarakat di lereng Gunung Merapi yang memprediksi terjadinya letusan melalui perilaku hewan. Hal ini juga dapat ditemui di Aceh di mana para leluhurnya menciptakan syair yang memberikan ciri-ciri akan terjadinya bencana dengan banyaknya ikan yang terdampar di pantai dan air laut surut secara mendadak.

Adapun kearifan lokal dapat diartikan sebagai “cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaaman mendalam mereka akan

lingkungan setempat yang terbentuk dari tempat tinggal tersebut secara turun-temurun” (Hairumini et al., 2017). Kearifan lokal dapat dijadikan kekuatan dalam upaya mitigasi bencana. Basis kearifan lokal juga dapat dikembangkan dalam pendidikan kebencanaan. Upaya ini menjadi penting karena dapat mentransfer dan mengadaptasi berbagai strategi mengurangi risiko bencana kepada komunitas lain. Kemudian dapat meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan juga dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif terutama untuk masyarakat adat itu sendiri. Kearifan lokal juga tercermin dalam rumah tradisional Aceh untuk upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami. Bentuk-bentuk rumah adat di Indonesia memang menjadi kekayaan budaya tersendiri, tetapi tidak hanya memiliki nilai filosofis rumah adat di Aceh juga memiliki fungsi untuk menghadapi situasi bencana. Dari analisis struktur rumah aceh yang pernah diuji melalui perhitungan SAP 2000 “Rumah aceh terbukti mampu bertahan dari gempa karena struktur utama yang kokoh dan elastis sehingga tidak mudah patah, sehingga hanya terombang-ambing saat gempa kemudian kembali tegak” (Hairumini et al., 2017). Sehingga dikenal sebagai rumah adat yang tahan gempa dan tsunami.

Jika melihat pada kearifan lokal dari budaya lain kita dapat menemukan keberagaman yang semakin menunjukkan apabila budaya memengaruhi kemampuan masyarakat dalam melihat bencana. Hal ini tercermin pada kearifan lokal dan partisipasi persekutuan dayak dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Nilai-nilai budaya masyarakat Dayak masih sangat kental dalam menjaga alam. Masyarakat dayak memenuhi hidupnya dengan cara berladang. Mereka memiliki nilai-nilai dan tata cara untuk membuka lahan yang sebelumnya juga telah dilakukan perhitungan adat agar alam tetap terjaga. Sejak kecil mereka diajarkan untuk tidak meninggalkan api yang masih menyala karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Serangkaian ritual dilakukan oleh masyarakat Dayak ketika ingin membuka lahan. Sebagai contoh dalam ritual adat Kenyah diawali dengan ritual Uman Jenai yang dilakukan di awal tahun untuk tetua adat memberikan nasehat dan motivasi. Kemudian pada bulan keenam dilakukan pembukaan ladang, membakar ladang, dan acara menugal, selanjutnya dilakukan acara panen hasil ladang. Masyarakat adat juga menggunakan lahan seperlunya dan tetap menjaga kelestarian alam dengan menggunakan pupuk kompos untuk merawat ladang yang telah digunakan agar tanahnya tetap subur.

Terlepas dari itu risiko terjadinya bencana kebakaran masih sangat besar. Seperti pada tahun 2015 lahan seluas 2,61 juta hektar terbakar pada kejadian Karhutla (BNPB, 2016). Kemudian di tahun 2016 terjadi kembali kebakaran hutan dan lahan seluas 14,604,86 hektar (KLHK, 2016). Kebakaran ini banyak terjadi akibat pemerintah secara sepihak memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan tanpa adanya proses persetujuan. Dampaknya masyarakat adat tidak dapat mempraktikkan kearifan dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari. Keterlibatan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya pencegahan kerusakan lahan dan hutan masih sangat minim. Padahal masyarakat adat memiliki *local knowledge* atau pengetahuan setempat, *local wisdom* sebagai kebijakan setempat, dan *local genius* atau kecerdasan setempat. Partisipasi masyarakat adat akan efektif dan berjalan berkelanjutan jika hak-hak wilayah adatnya diakui dan dilindungi. Sebab jika berbicara mengenai upaya pengurangan risiko bencana masyarakat adat merupakan salah satu kelompok rentan yang cukup strategis untuk diprioritaskan.

Peran masyarakat adat tidak berhenti di proses pencegahan bencana saja tetapi partisipasinya juga dibutuhkan ketika bencana itu terjadi. Hal ini terbukti pada respons mereka ketika terjadi bencana “Masyarakat adat Dayak memiliki respons yang cepat tanggap dalam memadamkan api, sistem komando juga berjalan dengan baik sehingga diketahui titik mana saja yang sudah dalam proses pemadaman api. Sikap ini dipengaruhi

oleh pengaruh internal yaitu adanya rasa saling memiliki, rasa untuk peduli dan juga saling menjaga” (Dirhamsyah, Diar Budi Utama & Program, 2020). Eratnya rasa persaudaraan membuat masyarakat dayak bahu membahu ketika kebakaran lahan terjadi. Positifnya sikap masyarakat adat ini sudah selayaknya diimbangi dengan pemenuhan hak-hak mereka atas tanah kelahiran mereka. Utamanya dalam menghadapi bencana, hendaknya suara dan keterlibatan masyarakat adat dapat menjadi prioritas yang harus dipenuhi.

Kemampuan masyarakat adat dalam menghadapi kondisi bencana memang berbedabeda menyesuaikan dengan kondisi setempat. Namun kekayaan pengetahuan lokal ini sudah seharusnya dapat dikembangkan untuk diterapkan pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Peran budaya menjadi sangat besar untuk melindungi dan meminimalkan dampak dari terjadinya suatu bencana. Diperlukan pendampingan dari pemerintah agar pengetahuan masyarakat lokal ini sesuai dengan standar yang ada.

### **Kapasitas Respons Tanggap Bencana Berbasis Kelas Sosial**

Tidak hanya ada pada stratifikasi perbedaan gender dan budaya saja, kemampuan masyarakat dalam merespons bencana juga ditentukan oleh kelas sosial. Kelas sosial didefinisikan sebagai suatu lapisan (strata) yang membagi anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda. Menurut Pitirim A Sorokin stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu kelas atas atau golongan orang kaya raya, kelas menengah biasanya diisi oleh kaum profesional, dan kelas bawah yaitu mereka yang memperoleh pendapatan lebih sedikit dari jumlah kebutuhan pokok mereka. Tentunya perbedaan kelas ini akan menyebabkan kemampuan tiap golongan berbeda dalam menghadapi bencana. Sebab adanya perbedaan akses dan kapasitas ketika pra-bencana, masa darurat bencana hingga pemulihan pasca-bencana. Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki penduduk kelas menengah ke bawah, bahkan menurut Bank Dunia 79% penduduk terdiri dari kelas bawah, 20% kelas menengah, dan 1% kelas atas (Ansori, 2020). Perbedaan presentase yang sangat jauh terlihat dari data ini tentunya akan memengaruhi bagaimana respons masyarakat menurut kelas sosialnya.

Terjadinya bencana selalu beriringan dengan adanya kerugian material. Kerugian yang terjadi beragam mulai dari rusaknya rumah tempat tinggal, hilangnya uang atau surat berharga dengan total dari nominal sedikit hingga banyak. *European Commussuin for Latin America and Caribbean* mengusulkan sebuah metodologi untuk melakukan penilaian dampak bencana bagi ekonomi dibedakan dalam tiga kelompok (Artiani, 2011). *Direct damages* (kerusakan langsung) yang meliputi kerusakan -pada aset tetap, modal dan persediaan barang. Kedua yaitu *indirect damages* (kerusakan tidak langsung) yang dampaknya lebih pada arus barang yang tidak di produksi. AusAID (2005) membagi dampak ekonomi makro dari bencana alam dalam dua kelompok, yaitu dampak nyata dan dampak tidak nyata. Kerugian langsung biasanya menjadi fokus utama dari upaya mitigasi bencana agar dampak sekundernya dapat dikurangi atau dicegah. Kemudian ada kerugian tidak langsung yang merupakan dampak jangka panjang dari bencana seperti adanya perubahan struktur produksi dan distribusi barang.

Kategori kelas secara struktural pada umumnya merujuk pada basis perbedaan kekayaan atau pendapatan personal. Tentunya perbedaan stratifikasi kelas membuat adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam merespons bencana. Masyarakat dari golongan menengah ke bawah lebih rentan terdampak kemiskinan akibat terjadinya suatu bencana. Seperti dari sektor ekonomi, masyarakat kelas ke atas memang mengalami kerugian material yang lebih besar tetapi aset mereka cenderung lebih aman. Jika pada masyarakat kelas menengah ke bawah biasanya menyimpan kekayaan dan surat



berharganya di rumah maka para golongan menengah ke atas menyimpan kekayaan mereka di bank. Sehingga ketika terjadi bencana aset dari masyarakat golongan ke bawah ikut terbawa atau bahkan terkena dampak bencana, sedangkan hal ini tidak terjadi pada golongan ke atas yang asetnya cenderung lebih aman. Jika pada golongan menengah kebawah memiliki keterbatasan mobilisasi dan tidak bisa keluar dari area terjadinya bencana. Para golongan atas memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi yang lebih leluasa, mereka bisa memilih untuk meninggalkan daerah bencana ke tempat yang lebih aman.

Adanya perbedaan kelas menempatkan masyarakat miskin menjadi lebih rentan terkena dampak bencana. "Orang miskin relatif rentan, mereka yang lebih terdampak daripada orang kaya" Ujar direktur eksekutif Dompot Dhuafa, (Yusuf, 2014). Padahal jika ditarik lebih jauh para golongan kelas atas cenderung lebih banyak merusak alam. "Jika kita melihat padahal penyebab kerusakan lingkungan bukan kelompok miskin, mungkin ada tapi sedikit. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan pembukaan perkebunan sawit yang membuka lahan"- (Yusuf,2014) Beberapa peristiwa bencana memang disebabkan karena ulah manusia. Eksploitasi yang berlebihan, merusak ekosistem, pola konsumtif, dan keserakahan manusia seringkali menjadi penyebab dari terjadinya potensi bencana. Sebagian besar kerusakan memang disebabkan oleh para korporat dan para elite kapitalis yang tidak pernah puas. Namun dampak yang ditimbulkan ketika terjadi suatu bencana lebih kuat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.

Ketimpangan kemampuan kelas sosial juga dapat dilihat dari Pandemi Covid-19. Wabah virus yang menyerang hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menimbulkan dampak yang begitu besar bahkan mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Lebih dari 200 negara diperkirakan telah terjangkit oleh virus ini. Di Indonesia sendiri virus ini pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Virus ini dapat menyerang siapapun tanpa mempedulikan perbedaan kelas sosial, suku, gender, dan budaya. Namun kelas masyarakat bawah merupakan kelompok yang paling rentan dan berisiko. Masyarakat kelas bawah lebih rentan karena tidak memiliki akses sumber daya dan ketahanan sosial yang baik. Dalam upaya untuk menekan laju paparan dari virus ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan yang sebenarnya memiliki maksud baik ini justru menimbulkan kepanikan baru.

Dalam buku Keluarga Miskin Dalam Gempuran Pandemi Covid 19 menunjukkan analisis terkait dampak ekonomi yang dirasakan keluarga miskin akibat Covid-19. Kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk tidak keluar rumah menjadikan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Khususnya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah karena cara mereka memenuhi kebutuhan hidup bergantung dari penghasilan harian. Pandemi Covid-19 juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya hingga keadaan ekonomi mereka benar-benar terpuruk. "tidak ada pemasukan, benar-benar prihatin karena setelah corona angkringan tempat bekerja tidak jualan dan otomatis saya diberhentikan. Sekarang usaha titip makanan tapi tidak begitu laku, susah penjualannya (*Keluarga Miskin Dalam*, n.d.). Ketika pendapatan dapat dikatakan turun tetapi kebutuhan masyarakat justru bertambah. Adanya pengeluaran tambahan seperti membeli paket data, membeli masker dan vitamin menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Ketimpangan juga dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Data terkait jumlah orang yang terpapar virus Covid-19 selalu disampaikan oleh pemerintah setiap harinya. Namun data di lapangan dipercaya jauh lebih banyak dari data resmi yang dilaporkan ke pemerintah. Salah satu Epidemiolog Universitas Airlangga mengatakan "Semua ahli sudah mengatakan kasus-kasus yang dilaporkan sekarang ini hanya sekadar 1/10 atau 1/8 dari kasus yang sesungguhnya"

(Purnomo, 7/6). Hal ini dipengaruhi karena kurangnya *tracing* yang dilakukan ditambah dengan mahalnya harga *tes swab*. Tentu saja menyebabkan banyak dari masyarakat miskin yang lebih memilih menggunakan uangnya untuk kebutuhan makan daripada untuk memeriksakan diri ketika mengalami gejala Covid 19. Padahal ini menjadi bentuk dari salah satu hak masyarakat yang seharusnya dapat dijamin oleh pemerintah. Harga tes yang masih mahal, variative, dan tidak terjangkau bagi elemen masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan keadilan atas hak mengakses layanan kesehatan.

Hal berbeda terjadi pada golongan kelas atas yang relatif dapat bertahan pada situasi pandemi. Untuk urusan makan misalnya mereka masih lebih terjamin, Biaya tambahan seperti kuota internet dan vitamin juga bukan merupakan masalah besar. Akses terhadap pelayanan kesehatan juga cenderung lebih maksimal sebab mereka yang merasakan gejala dapat dideteksi lebih dini. Tentunya akan mendapat perawatan yang sesuai sehingga risiko terjadinya kematian dapat diturunkan. Dilema yang besar memang dihadapi oleh masyarakat kelas bawah karena mereka seringkali dihadapkan dengan pilihan terpapar virus Covid-19 atau tidak makan hari itu. Meskipun ada upaya pemerintah untuk memberikan bantuan sosial untuk membantu masyarakat tetapi pada pelaksanaannya program ini masih banyak bermasalah hingga tidak tepat sasaran.

Adanya stratifikasi kelas sosial memang memberikan perbedaan respons masyarakat dalam menghadapi bencana. Adanya perbedaan pendapatan juga turut memengaruhi tindakan dalam merespons bencana. Kelompok masyarakat miskin kerap kali menjadi yang paling rentan, bahkan tidak jarang mereka harus merasakan dampak yang paling besar dari tindakan merusak yang dilakukan oleh orang kelas atas. Ketimpangan juga dirasakan pada perbedaan akses yang dimiliki baik akses untuk mobilisasi maupun akses untuk pelayanan kesehatan. Kondisi bencana pada masyarakat bawah terasa lebih kompleks, seperti pada kasus pandemi Covid-19 di mana masyarakat miskin seperti dihadapkan pada pilihan kesehatan atau makan. Sudah seharusnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang lebih dapat mengakomodasi keperluan dari hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Program bantuan sosial juga seharusnya dapat diimplementasikan dengan lebih maksimal tanpa ada penyalahgunaan.

Berbagai jenis bencana berpotensi terjadi di Indonesia membuat masyarakat beradaptasi untuk dapat merespons bencana dengan bijak. Namun dalam upaya merespons bencana masih terdapat stratifikasi yang menjadi pembeda dari masing-masing individu dan kelompok. Perbedaan menurut gender, budaya, dan kelas sosial seharusnya dapat dimaksimalkan dalam upaya pencegahan, masa darurat hingga pasca bencana untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul. Adanya perbedaan kemampuan dalam merespons bencana dipengaruhi oleh banyak faktor. Pemaparan di atas menyajikan berbagai faktor penyebabnya serta memberikan gambaran terkait kemampuan respons bencana pada setiap golongan.

## **KESIMPULAN**

Kejadian bencana sudah seharusnya dipandang sebagai pengetahuan dan pengalaman kolektif. Indonesia sebagai laboratorium bencana mengharuskan masyarakatnya untuk memiliki sikap tanggap bencana yang bijak. Adanya perbedaan kemampuan dalam merespons bencana menurut gender, budaya, dan kelas sosial menunjukkan bahwa banyak hal yang dapat menjadi bahan evaluasi dan juga sebagai ilmu baru dalam menghadapi peristiwa bencana. Meskipun kemampuan merespons bencana pada setiap individu dan kelompok dapat berbeda-beda tetapi itu merepresentasikan bagaimana stratifikasi sosial berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Kemampuan merespons bencana akan sangat berpengaruh pada tahap pencegahan, keadaan darurat dan masa

pemulihan. Semakin baik kapasitas masyarakat dalam merespons terjadinya bencana dapat menekan dampak kerusakan dan mempercepat proses rekonstruksi pasca bencana.

Kemampuan merespons bencana pada gender menunjukkan jika ada perbedaan kapasitas karena adanya konstruksi yang melekat pada perempuan sebagai ibu rumah tangga dan beban domestik yang melekat. Tidak hanya itu kurangnya akses informasi dan minimnya keterlibatan perempuan dalam mitigasi kebencanaan menjadikan perempuan kelompok yang rentan. Secara fisik kerap kali perempuan dianggap lebih lemah. Hal ini yang menyebabkan adanya kemampuan merespons bencana pada laki-laki dan perempuan. Padahal segala potensi yang ada pada perempuan dapat dilibatkan dan diakomodasi, sehingga dapat dijadikan prioritas. Sebab jika dimanfaatkan dengan maksimal perempuan dapat menjadi garda depan dalam merespons terjadinya bencana. Analisis yang sama juga dilakukan pada kemampuan merespons bencana berbasis budaya. Kekayaan budaya yang ada di Indonesia melahirkan banyak tata cara dan kepercayaan masyarakat dalam memandang bencana. Kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat adat terbukti mampu menjawab kebutuhan mereka dalam menghadapi bencana. Namun tetap perlu adanya pendampingan dari pemerintah agar kearifan lokal ini tetap sesuai dengan standar situasi darurat yang ada agar tidak menjadi persepsi yang salah. Kearifan lokal masyarakat adat biasanya timbul dari tanda-tanda alam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Oleh sebab itu kearifan lokal harus dijaga dan dilestarikan. Budaya yang telah menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat, seharusnya dapat dioptimalkan untuk menjaga, mengatasi, dan memulihkan bencana. Tidak hanya itu kelas sosial yang melekat pada pembagian stratifikasi masyarakat juga menimbulkan adanya kesenjangan kemampuan merespons bencana. Hal ini disebabkan karena perbedaan penghasilan, perbedaan akses mobilisasi dan akses layanan kesehatan. Dalam keadaan bencana masyarakat kelas bawah seringkali menjadi korban yang paling parah. Pemerintah harus lebih bisa menjamin hak-hak masyarakat agar ketimpangan yang ada tidak semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusintadewi, N. K. (2020). *Membangun Budaya Tanggap Bencana Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia*. October 2019.
- Ansori, M. H. (2020). Wabah COVID-19 dan kelas sosial di Indonesia. *Habibiecenter.or.Id*, 14, 1–5. <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/09da4f0fd333100e97d2b2bc1aec3163.pdf>
- Artiani, L. E. (2011). Dampak Ekonomi Makro Bencana : Interaksi Bencana dan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta*, 1(5), 67–74.
- BNPB, 2021. Data Kejadian Bencana per Provinsi 2021. Jakarta : Geoportal Data Bencana Indonesia
- Dirhamsyah, Diar Budi Utama, N. W. & I. D. K. W., & Program. (2020). Local Wisdom and Participation of the East Kalimantan Dayak Alliance in Dealing with Forest and Land Fire Disasters. *Perspektif*, 9(2), 314–321.
- Dukcapil Kemendagri, 2021. Data Kependudukan Semester 1 2021. Jakarta : Dirjen Dukcapil
- Enarson, E. (2000a). Gender and Natural Disasters. In *InFocus Programme on Crisis Response and Reconstruction*.
- Enarson, E. (2000b). Gender equality, work, and disaster reduction: Making the connections. *Prepared for the ILO InFocus Programme on Crisis Response and Reconstruction, August*.
- Hairumini, Setyowati, D. L., & Sanjoto, T. B. (2017). Kearifan Lokal Rumah Tradisional Aceh sebagai Warisan Budaya untuk Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami. *Journal of Educational Social Studies*, 6(1), 37–44. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>
- Handayani, B. L. (2018). Memperkuat Modal Sosial Perempuan dalam Menghadapi Bencana.

- Indonesia, C. (n.d.). *Gender dalam Pengurangan Risiko Bencana*. Inter-agency Secretariat for the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). (2003). *Women, Disaster Reduction and Sustainable Development*. World Meteorological Organization (WMO).
- Keluarga Miskin Dalam*. (n.d.).
- Kebudayaan, K., & Indonesia, P. R. (2011). Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia*. Jakarta
- Latifa, A. (2015). *Digital Repository Universitas Jember*. 27. [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul Latifah-101810401034.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul%20Latifah-101810401034.pdf?sequence=1)
- Magala, yuda 2019 IDEAS : Orang Miskin Lebih Terdampak Kerusakan Alam <https://www.republika.co.id/berita/pw6s90284/ideas-orang-miskin-lebih-terdampak-kerusakan-alam>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Sitorus, P. B. R. (2018). Budaya Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat Kepulauan Mentawai Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 16(2).
- Supriatin, 2021 Epidemiolog Kasus Covid-19 yang di Laporkan Sekarang Hanya 1/10 Dari Sesungguhnya <https://www.merdeka.com/peristiwa/epidemiolog-kasus-covid-19-dilaporkan-sekarang-hanya-110-dari-sesungguhnya.html>
- UU Nomor 24 Tahun 2007. (2007). *UU-24-2007 Penanggulangan Bencana*. 43.